

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik E-Commerce 2021. Retrieved on May 30, 2022, from <https://www.bps.go.id>
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). *Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Makmur Auto Mandiri*. In *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404-411.
- Budiarto, M. T., & Cahyono, B. (2020). *Mengulik Kewajiban Penyedia Platform Marketplace dan Pedagang Sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Bisnis Dagang Transaksi Elektronik (e-commerce)*. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1-14.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Nenggapratama Internusa*. In *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 78-87.
- Dharma, L. (2016). *Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan dan Religius Terhadap Presepsi Penggelapan Pajak*. In *JOM Fekon*, 3(1), 1565-1578.
- Dinar, M. P. A. S. (2021). *Analisis Aspek Perpajakan Atas Jasa Sewa Kantor Virtual*. In *Scientax*, 3(1), 88-104.
- Internet World Stats. (2021). Internet 2021 usage in Asia. Retrieved on May 30, 2022, from <https://www.internetworldstats.com>
- Judisseno, R. (2004). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Informasi Laporan APBN Tahun 2017*. Retrieved on June 5, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id>

- Kementerian Keuangan. (2018). Informasi Laporan APBN Tahun 2018, Retrieved on June 5, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce).
- Kementerian Keuangan. (2019). Informasi Laporan APBN Tahun 2019, Retrieved on June 5, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Le, T. M. (2013). *Value Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues*. In Europe, 1-55.
- Mandey, A. H. (2013). *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Hasjrat Abadi Manado*. In EMBA, 1(3), 99-109.
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). *Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri*. In Scientax, 1(2), 131-148.
- Posumah, P. I. C. (2013). *Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia TBK Manado*. In Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 1(3), 436-445.
- Rachman, A., & Ngadiman. (2020). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Kegiatan Transaksi e-Commerce*. In Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara, 2(Oktober), 1861-1868.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen Tentang Undang-Undang 1945 dan Amandemen.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai baran dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Saputra, A. (2020). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT DCM Tahun 2017*. In Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 112-118.
- Schreiber, J., & Asner-Self, K. (2011). *Educational Research: The Interrelationship of Questions, Sampling, Design, and Analysis*. U.S.A: Wiley.
- Siswanto, A. A. (2019). *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jual Beli Saldo Uang Elektronik*. In Jurist Diction, 4(1), 17-32.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tiraada, T. A. M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Diskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan*. In EMBA, 1(3), 999-1008.
- Trisnajuna, M., & Sisdyani, E. A. (2015). *Pengaruh Aset Tidak Berwujud dan Biaya Penelitian dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar dan Kinerja*

- Keuangan Perusahaan*. In *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(11), 888-915.
- Tunas, D. S. (2013). *Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. In *EMBA*, 1(4), 1520-1531
- Utomo, R. (2017). *Tantangan Pengawasan PPN atas Transaksi Konten Digital*. In *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 1-6.
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). *Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. In *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109-125.
- Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). *Kajian Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. In *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 125-144.
- Wijaya, S., & Nirvana A. P. (2021). *Value Added Tax of Trading Through Electronic Systems (Case Study: PT Shopee International Indonesia)*. In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245-256.
- Wijaya, S., Setyon, N. N., & Azizah, W. N. (2020). *Potential Analysis and Supervision of VAT on The Utilization of Digital Contents (Case Study: Steam Platform)*. In *International Journal of Digital Business Management*, 1(3), 342-352.